

V. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																	
	1) Penyempurnaan hasil Analisis Jabatan	Dokumen hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan Hasil analisis jabatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	85.000.000,00
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil penyempurnaan pada jabatan															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	2) Penyempurnaan Hasil Analisis Beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan hasil ABK sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	110.000.000,00
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	3) Penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Sudah dilaksanakan tahun 2015 - 2018												Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
			b. Penerapan hasil pada jabatan															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
		1 Dokumen	d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4)	Penyempurnaan <i>job grading</i>	Dokumen <i>job grading</i> yang disempurnakan	a. Penyusunan rencana penyempurnaan <i>job grading</i>														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	75.000.000,00	
		1 Dokumen	b. Penyempurnaan <i>job grading</i> untuk seluruh jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan																
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring penyempurnaan <i>job grading</i>																
			d. Penerapan hasil <i>job grading</i> pada penentuan sistem penggajian																
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																
			f. Evaluasi																
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi																
5)	Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)	Dokumen rencana kebutuhan PNS yang sudah disempurnakan	a. Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		1 dokumen	b. Penerapan hasil pada rekrutmen																
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			d. Evaluasi																
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																
6)	Penyempurnaan sistem rekrutmen PNS (persiapan untuk rekrutmen 2019)	Sistem rekrutmen yang sudah diperbaiki	a. Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai (persiapan untuk rekrutmen 2019)														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		1 sistem	b. Uji coba sistem baru																
7)	Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru (tahun 2019)	% CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru																
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			c. Evaluasi																
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8)	Penyempurnaan Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	% pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penyempurnaan Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		90%	b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka														
			c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi														
9)	Evaluasi Jabatan	Dokumen hasil evaluasi jabatan	a. Lanjutan Penerapan hasil evaluasi jabatan pada Sistem Manajemen SDM Aparatur													Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		1 Dokumen	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi														
10)	Review penggunaan hasil <i>assessment</i> kompetensi untuk pengelolaan SDM	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Review penggunaan hasil <i>assessment</i> kompetensi untuk pengelolaan SDM													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
			b. Penggunaan hasil <i>assessment</i> untuk pengelolaan SDM														
		90%	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
11)	Updating kebutuhan dan rencana pengembangan PNS untuk tahun 2018-2019	Dokumen rencana pengembangan PNS	a. Penyusunan rencana penyusunan kebutuhan pengembangan PNS	Sudah dilaksanakan tahun 2017													
		1 dokumen	b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan PNS														
12)	Lanjutan Pelaksanaan pengembangan PNS sesuai kebutuhan	% pegawai yang mengikuti pengembangan pegawai	a. Pelaksanaan pengembangan PNS													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		8,78%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan pengembangan PNS														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13)	Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS	Aplikasi rencana penempatan dan pola karier PNS	a. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional	Sudah disusun tahun 2015													
		1 Aplikasi	b. Penerapan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
14)	Lanjutan Penerapan rencana penempatan dan pola karier	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penerapan rencana penempatan dan sistem pola karier pada Sistem Manajemen SDM													BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		90%	b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
15)	Penyusunan sistem manajemen kinerja PNS	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana pembangunan sistem manajemen kinerja PNS dan pengembangannya	Sudah disusun tahun 2015													
		1 sistem	b. Penyusunan Sistem Manajemen kinerja PNS dan pengembangannya														
			c. Uji coba														
			d. Penyempurnaan hasil uji coba														
16)	Updating sistem manajemen kinerja PNS	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana updating sistem manajemen kinerja PNS	Sudah dilaksanakan tahun 2018													
		1 sistem	b. Updating sistem manajemen kinerja PNS														
			c. Uji coba														
			d. Penyempurnaan hasil uji coba														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
17)	Lanjutan Penerapan sistem manajemen kinerja Aparatur	% SKPD yang menerapkan Sistem	a. Penerapan sistem manajemen kinerja Aparatur													BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi														
18)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian	Jumlah sosialisasi	a. Penyusunan rencana sosialisasi													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		3 kali	b. Pelaksanaan Sosialisasi														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
19)	Penerapan kebijakan kepegawaian	Jumlah kebijakan kepegawaian yang diterapkan	a. Penyusunan rencana penerapan aturan kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban PNS													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		1 Peraturan	b. Penerapan (setelah melalui sosialisasi)														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
20)	Lanjutan Pelaksanaan pengembangan kepribadian <i>role model</i>	% Pejabat yang memperoleh pengembangan kepribadian	a. Lanjutan Pelaksanaan <i>role model</i> bagi para pejabat													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		100%	b. Pelaksanaan pengembangan <i>role model</i> bagi para pejabat														
			c. Penerapan <i>role model</i> bagi seluruh pejabat														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi														
21)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM													Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		90%	b. Tindak lanjut hasil monitoring														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	22) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM														Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
	23) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM															
	24) Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2018	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 90%	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2018														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
	25) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota Malang	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															
2.	Peningkatan disiplin aparatur																	
	1) Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS	Persentase PNS yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar 10%	a. Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi														BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
	2) Penyempurnaan Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)	Persentase aparatur yang capaian kerjanya sesuai target	a. Penyempurnaan Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja aparatur (Sistem Manajemen Kinerja aparatur)															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		90%		b. Penerapan Sistem Manajemen Kinerja yang telah diintegrasikan dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja aparatur															
				c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring															
				d. Evaluasi hasil penerapan															
				e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	3) Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Persentase pelanggaran disiplin PNS yang telah ditindaklanjuti		a. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan disiplin PNS															
		100%		b. Pembentukan Tim pembinaan disiplin PNS															
				c. Pelaksanaan pembinaan disiplin PNS															
				d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
				e. Evaluasi															
				f. Tindak lanjut hasil evaluasi															
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan																		
	1) Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dalam pembahasan		a. Penyusunan rencana kerja asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah															
				b. Pelaksanaan asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah															
		30 Ranperda		c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
				d. Evaluasi															
				e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	2) <i>Workshop</i> Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Tingkat partisipasi masyarakat dalam <i>workshop</i> Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD		a. Penyusunan rencana kegiatan <i>workshop</i>															
				b. Pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		90%	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
3)	Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD														Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD															
		30 Ranperda	c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															
4)	Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota	Jumlah Ranperwali dan Rankepwali yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD														Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	
			b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD															
		60 Ranperwali 500 Rankepwali	c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5)	Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi	■												Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota		■	■											
		20 Perda 20 Perwali	c. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota			■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		d. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		f. Evaluasi						■	■	■	■	■	■	■			
		g. Tindak lanjut hasil evaluasi							■	■	■	■	■	■			
6)	Redokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen Produk Hukum Daerah yang disusun	a. Identifikasi produk hukum daerah yang perlu didokumentasikan kembali		■	■									Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan		
			5 Dokumen	b. Penyusunan rencana pendokumentasian kembali produk hukum daerah				■									
		c. Pelaksanaan pendokumentasian kembali produk hukum daerah					■	■	■	■	■	■	■				
		d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan					■	■	■	■	■	■	■				
		e. Evaluasi											■				
		f. Tindak lanjut hasil evaluasi												■			
7)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	h. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan	■	■	■									Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan		
		90%	i. Tindak lanjut hasil monitoring	■	■	■											

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	8) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan															
	9) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan															
	10) Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2018	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 90%	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2018														Bagian Hukum SKPD terkait Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
	11) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Malang	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Pelaksanaan koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangan c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
4.	Penguatan Pengawasan																	
	1) Penyusunan kebutuhan tenaga fungsional Auditor dan P2UPD	Jumlah Auditor 16 orang Jumlah P2UPD 13 orang	Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur														BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
	2) Penyusunan rencana pengembangan Auditor dan P2UPD	Persentase Auditor dan P2UPD yang memperoleh peningkatan kompetensi 100%		Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3)	Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	% evaluasi SPIP SKPD	a. Penyusunan rencana evaluasi penerapan SPIP	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
		100%	b. Sosialisasi instrumen evaluasi SPIP																
4)	Lanjutan Penerapan SPIP pada SKPD yang belum melaksanakan/belum optimal melaksanakan	% SKPD yang menerapkan SPIP	a. Lanjutan penerapan SPIP di SKPD																
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			c. Evaluasi																
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																
5)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD untuk tahun 2018	Opini BPK	Penyusunan rencana monitoring															BPKAD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
		WTP																	
6)	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan	Jumlah Sosialisasi	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan	Sudah dilaksanakan tahun 2015 - 2017															
		4 kali																	
7)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD tahun 2018	Opini BPK	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD																
		WTP	b. Tindak lanjut hasil monitoring																
8)	Sosialisasi LHKPN	Jumlah Sosialisasi	Sosialisasi LHPKN	Sudah dilaksanakan tahun 2015												BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja			
		2 kali																	
9)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Sudah dilaksanakan tahun 2015 - 2016															
		100%	b. Monitoring penyerahan LHKPN																
10)	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja			
		100%																	
11)	Lanjutan Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN																
		100%																	
12)	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN																
		100%																	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
13)	Lanjutan Penerapan <i>wistleblower</i>	% jumlah pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	a. Lanjutan Penerapan <i>wistleblower</i>														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi															
14)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
		90%	b. Tindak lanjut hasil monitoring															
15)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan															
		90%																
16)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi															
		90%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan															
17)	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2017	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2017															
		90%																
18)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
		100%	b. Penyusunan prioritas															
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan															
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)			
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
5.	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan																			
	1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mendapatkan pelatihan 80%	Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur												BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018				
	2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja		Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																	
6.	Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik																			
1)	Lanjutan Penyusunan sistem dan prosedur tetap	Jumlah kebijakan terkait sistem dan prosedur tetap 5 Ranperwali	a. Lanjutan Penyusunan sistem dan prosedur tetap																	
			b. Penetapan sistem dan prosedur tetap																	
			c. Penerapan sistem dan prosedur tetap																	
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			e. Evaluasi																	
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
	2) Penyusunan/perbaikan SP (termasuk SP pengawasan dan penyusunan laporan)	Jumlah Standar Pelayanan yang telah disusun sesuai ketentuan 50 SP	a. Penyusunan SP baru/ penyempurnaan SP yang ada di SKPD																	
			b. Pembahasan SP bersama seluruh <i>stakeholder</i>																	
			c. Penerapan SP di SKPD																	
			d. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			e. Evaluasi hasil penerapan																	
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi																	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3)	Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	Jumlah SOP yang telah diterapkan	a. Penyusunan SOP baru/ penyempurnaan SOP yang ada di SKPD													SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		200 SOP	b. Penerapan SOP di SKPD														
			c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi hasil penerapan														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
4)	Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Perda	a. Perencanaan penyusunan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	Sudah disusun tahun 2015												BP2T Bagian Hukum Bagian Organisasi Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
		2 Dokumen	b. Pengkajian penerapan sistem PTSP														
			c. Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda sistem penyelenggaraan PTSP														
			d. Pembahasan dengan melibatkan seluruh seluruh stakeholder														
			e. Tindak lanjut hasil pembahasan														
			f. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses legislasi														
			g. Legislasi Rancangan Perda														
5)	Penyusunan Tata Cara Pencabutan Izin dan Non Izin	Rancangan Peraturan Walikota	a. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Sudah disusun tahun 2015													
		1 Ranperwal	b. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota														
			c. <i>Workshop</i> pembahasan Rancangan Peraturan Walikota	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015													
			d. Tindak lanjut hasil <i>workshop</i>														
			e. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses penetapan														
			f. Penerapan pelayanan Pencabutan Izin dan Non Izin	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2016													
			g. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			h. Evaluasi														
		i. Tindak lanjut hasil evaluasi															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																
	1) Peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin	Rekomendasi Tim Teknis untuk Penerbitan Izin 12.157 Rekom	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap permohonan izin b. Pembentukan Tim Teknis Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi													BP2T Tim Teknis Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
	2) Peninjauan lapangan dan pengawasan izin	Rekomendasi Tim Pengawasan Perizinan 12.157 Rekom	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap izin yang diterbitkan b. Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis hasil pengawasan d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi													BP2T Tim Pengawasan Terpadu Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	3) Pelayanan Mobil Keliling	Layanan izin trayek keliling 4 kali/bulan	a. Penyusunan rencana layanan mobil keliling b. Penyiapan sarana, prasarana dan petugas layanan c. Pelaksanaan layanan d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi													BP2T Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4)	Lanjutan Penerapan SIM Perizinan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	a. Lanjutan Penerapan SIM Perizinan														BP2T Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		98%	b. Monitoring pelaksanaan SIM Perizinan																
			c. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring																
			d. Evaluasi terhadap penerapan																
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																
5)	Survei kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Penyusunan rencana survei terhadap seluruh jenis pelayanan														Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
		90%	b. Penyusunan instrumen survei dan uji cobanya																
			c. Pelaksanaan survei																
			d. Pengolahan data dan analisis hasil survei																
			e. Penyusunan rekomendasi																
6)	Pengkajian penerapan PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Pengkajian penerapan PTSP	Sudah dilaksanakan tahun 2016															
			b. Penyusunan kerangka sistem PTSP																
		90%	c. Penyusunan rencana penerapan																
			a. Penerapan PTSP sesuai rencana																
			d. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																
			e. Evaluasi																
7)	Lanjutan pelaksanaan PTSP untuk <i>quick wins</i>	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Lanjutan Penerapan PTSP sebagai <i>quick wins</i>														BP2T SKPD terkait Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
		90%	b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																
			c. Evaluasi																
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
8)	Pengembangan PTSP (<i>quick wins</i>) untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Penyusunan rencana pengembangan PTSP untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Sudah dilaksanakan tahun 2017												BP2T SKPD terkait Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
		90%	b. Penyiapan PTSP (sistem, mekanisme kerja, penggunaan teknologi informasi, SDM, sarana dan prasana, dst.)	Sudah dilaksanakan tahun 2017															
			c. Pelaksanaan PTSP																
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi																
9)	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan	Sudah dilaksanakan tahun 2017															
		90%																	
10)	Lanjutan Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	b. Lanjutan penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi <i>quick wins</i>														BP2T Dinas Kominfo Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
		90%	c. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																
			d. Evaluasi																
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																
11)	Monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Persentase Unit Pelayanan yang telah melakukan pelayanan sesuai standar	a. Penyusunan rencana pelaksanaan monev ke Unit Pelayanan dalam rangka pelayanan publik														Bagian Organisasi Inspektorat Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
		90%	b. Pembentukan Tim Monev pelayanan publik																
			c. Penetapan parameter monev pelayanan public																
			d. Pelaksanaan monev pelayanan public																
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																
			f. Evaluasi																
				g. Tindak lanjut hasil evaluasi															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan Pelayanan Publik													Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Tindak lanjut hasil monitoring														
	13) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik														
		90%															
	14) Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi														
90%		b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik															
15) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Malang	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi															
		b. Penyusunan prioritas															
	100%	c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan															
		d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															
8.	Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu																
1)	Sertifikasi Standar Manajemen Mutu ISO 9001-2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008	a. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008												SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
			b. Implementasi ISO 9001 : 2008														
			c. Audit Internal														
			d. Perbaikan hasil audit internal														
			e. Rapat Tinjauan Manajemen														
			f. Audit Eksternal/Sertifikasi														
			g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2) Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008	a. Review dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008														SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Implementasi ISO 9001 : 2008															
			c. Audit Internal															
			d. Perbaikan hasil audit internal															
			e. Rapat Tinjauan Manajemen															
			f. Audit Eksternal/Sertifikasi															
			g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi															
9.	Penataan Administrasi Kependudukan																	
	1) Pelayanan administrasi kependudukan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kependudukan 98%	a. Pelayanan administrasi kependudukan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2018 - 2019															
	2) Penerapan SIM data base kependudukan	SIM data base kependudukan 1 sistem	a. Penerapan SIM data base kependudukan															
			b. Monitoring pelaksanaan SIM data base kependudukan															
			c. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring															
			d. Evaluasi terhadap penerapan															
			e. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tahun 2018 - 2019															
	3) Pengelolaan Maintenance Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	a. Penyusunan pengelolaan maintenance jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
b. Identifikasi Trouble Shooting jaringan																		

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		1 Jaringan Pelayanan Administrasi kependudukan	c. <i>Maintenance</i> jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
			d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	Sudah dilaksanakan tahun 2016														
4)	Pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	a. Penyusunan rencana pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan															
		1 sistem	b. Persiapan sarana dan prasarana Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan															
			c. Uji coba	Sudah dilaksanakan tahun 2016														
			d. Penyempurnaan hasil uji coba															
			e. Penerapan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan															
			f. Monitoring dan tindak lanjut penerapan															
			g. Evaluasi															
			h. Tindak lanjut hasil evaluasi															
5)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	Dokumen hasil monev dan pelaporan administrasi kependudukan	a. Penyusunan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan															
		2 Dokumen	b. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan															
			c. Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan															
			d. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			e. Penyusunan pelaporan administrasi kependudukan																
10.	<i>Quick Wins</i>																		
	1) Pengembangan sistem informasi pelayanan kependudukan di Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kelurahan	a. Identifikasi Kelurahan untuk penerapan sistem informasi pelayanan kependudukan berbasis <i>online</i> (diselaraskan dengan kegiatan nomor 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan)	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Pokja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kominfo Kelurahan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
		98%	b. Penyusun sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2015															
			c. Uji coba sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2015															
			d. Penyempurnaan sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2015															
			e. Penerapan sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2016															
		% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	f. Monitoring pelaksanaan sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2016															
		90%	g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring	Sudah dilaksanakan tahun 2016															
			h. Evaluasi terhadap penerapan sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2016															
			i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi																
			j. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan berikutnya																
	2) Penerapan pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015												BP2T Bagian Organisasi Bagian Hukum Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
	a) Pengkajian pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015															
	b) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015															
	c) Penyusunan rancangan pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015															

No.	Program/Kegiatan	Indikator		Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	d) Uji coba				Sudah dilaksanakan tahun 2015														
	e) Penyempurnaan hasil uji coba				Sudah dilaksanakan tahun 2015														
	f) Sosialisasi				Sudah dilaksanakan tahun 2015														
	g) Lanjutan Penerapan pelayanan perizinan paralel	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan paralel	90%	Penerapan pelayanan perizinan paralel	Sudah dilaksanakan tahun 2016														
	h) Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	90%	(1) Monitoring	Sudah dilaksanakan tahun 2016														
				(2) Tindak lanjut hasil monitoring	Sudah dilaksanakan tahun 2016														
	i) Evaluasi				Sudah dilaksanakan tahun 2016														
	j) Pemeliharaan dan pengembangan pelayanan perizinan paralel	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan paralel	90%	(1) Pemeliharaan pelayanan perizinan paralel yang sudah berjalan baik															Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
				(2) Pengembangan pelayanan perizinan paralel untuk jenis-jenis pelayanan baru															
				(3) Penerapan pelayanan perizinan paralel															
11.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																		
	1) Penandatanganan Pakta Integritas	Jumlah SKPD yang telah menandatangani Pakta Integritas	100 SKPD	Penandatanganan Pakta Integritas	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat SKPD terkait Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
	2) Penyiapan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang disiapkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1 SKPD	Penyiapan 1 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM															
	3) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1 SKPD	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4)	Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 11 SKPD yang baru ditetapkan untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2019	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	a. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 10 SKPD														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		80%	b. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 1 SKPD tahun 2019																
	5) Monitoring dan Evaluasi	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring																
		90%	b. Evaluasi																
	6) Pelaksanaan perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi																
		90%	b. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya																
	7) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	a. Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya																
90%		b. Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM																	
12.	Penataan Ketatalaksanaan																		
1)	Penataan ketatalaksanaan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>	% dari jumlah kebijakan ketatalaksanaan baru yang diterbitkan sebagai pengganti kebijakan ketatalaksanaan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan	a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan <i>quick wins</i>	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Bagian Organisasi Bagian Hukum SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
		80%	b. Penyusunan rencana pembahasan penataan	Sudah dilaksanakan tahun 2015															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			c. Lanjutan perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan <i>quick wins</i>															
			d. Penetapan kebijakan															
			e. Implementasi															
	2) Penyempurnaan e-procurement	Tingkat kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	a. Penyempurnaan e-procurement	Sudah dilaksanakan tahun 2016												LPSE ULP Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		98%	b. Lanjutan penerapan e-procurement															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
13.	Penguatan dan Penataan Organisasi																	
	1) Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>	Persentase organisasi Perangkat Daerah yang ditata	a. Lanjutan Pelaksanaan perubahan kebijakan yang dianggap menghambat pelayanan dan menghambat penerapan <i>quick wins</i>	Sudah dilaksanakan tahun 2015 - 2018												Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		100%	b. Monitoring															
			c. Tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	2) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	a. Penyusunan rencana penataan terhadap tugas dan fungsi dengan dasar hasil pemetaan proses bisnis	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
		100%	b. Perumusan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan)	Sudah dilaksanakan tahun 2015														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			c. Penerapan hasil penataan															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019